

**KOORDINASI DINAS PARIWISATA DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN WISATA PANTAI LABUHAN JUKUNG**

(Skripsi)

Oleh

**RAIHAN ADLI
2016041005**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**KOORDINASI DINAS PARIWISATA DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN WISATA PANTAI LABUHAN JUKUNG**

Oleh

**RAIHAN ADLI
2016041005**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KOORDINASI DINAS PARIWISATA DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN WISATA PANTAI LABUHAN JUKUNG

Oleh:

RAIHAN ADLI

Kebersihan Lingkungan di Pantai Labuhan Jukung merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung dan mengakibatkan peningkatan jumlah sampah konsumsi dan sampah bekas pakai yang dihasilkan wisatawan dan pedagang. Maka dari itu perlu adanya koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan kebersihan lingkungan agar masalah kebersihan lingkungan yang ada di pantai Labuhan Jukung dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kebersihan lingkungan serta mendeskripsikan faktor penghambat atas penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dikaji dengan teori koordinasi menurut Hasibuan (2006) dan Handayani (1989) yaitu Perencanaan, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa koordinasi belum berjalan dengan baik karena masih adanya tumpukan sampah yang ada di kawasan pantai labuhan jukung. Adapun yang menjadi hambatan pada pelaksanaan koordinasi yaitu kurangnya fasilitas pengelolaan kebersihan yang tersedia di pantai labuhan jukung yaitu berupa kotak sampah dan mobil pengangkut sampah, dan juga tidak adanya evaluasi yang dilakukan kedua instansi yang berkoordinasi untuk membahas dan mencari solusi terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan agar permasalahan kebersihan lingkungan di pantai labuhan jukung dapat diselesaikan.

Kata Kunci: Koordinasi, Pengelolaan Kebersihan, Sampah.

ABSTRACT

COORDINATION OF THE TOURISM DEPARTMENT AND THE ENVIRONMENTAL SERVICE OF WEST COASTAL DISTRICT IN THE MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL CLEANLINESS OF LABUHAN JUKUNG BEACH TOURISM

By:

RAIHAN ADLI

Environmental cleanliness at Labuhan Jukung Beach is one of the problems that has not been resolved, this is due to the increase in the number of tourists visiting and resulting in an increase in the amount of consumer waste and used waste produced by tourists and traders. Therefore, there needs to be coordination between the Tourism Department and the Environmental Service to manage environmental cleanliness so that environmental cleanliness problems on Labuhan Jukung beach can be resolved. This research aims to analyze the coordination between the Tourism Service and the Environment Service in managing environmental cleanliness and describe the factors inhibiting its implementation. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, documentation and observation studied with coordination theory according to Hasibuan (2006) and Handayani (1989), namely planning, unity of action, communication, division of work and discipline. Based on the research results obtained, it shows that coordination has not gone well because there are still piles of rubbish in the Labuhan Jukung beach area. What is an obstacle to the implementation of coordination is the lack of cleanliness management facilities available at Labuhan Jukung beach, namely in the form of rubbish boxes and rubbish collection trucks, and also the absence of evaluations carried out by the two coordinating agencies to discuss and find solutions related to activities that have been carried out so that problems can be resolved. environmental cleanliness at Labuhan Jukung beach can be completed.

Keywords: *Coordination, Cleanliness Management, Waste.*

Judul Skripsi : **KOORDINASI DINAS PARIWISATA DAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
PESISIR BARAT DALAM PENGELOLAAN
KEBERSIHAN LINGKUNGAN KAWASAN
WISATA PANTAI LABUHAN JUKUNG**

Nama Mahasiswa : **Raihan Adli**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016041005**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P
NIP. 19780923 200312 1 001


Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si
NIP. 19821212 200801 2 017

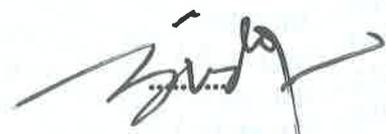
2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**


Meilhyana, S.IP., M.A
NIP. 1974050220 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

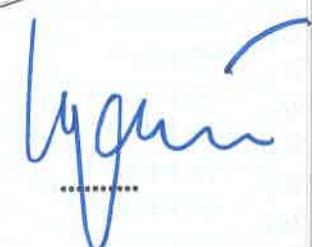
Ketua : Eko Budi Sulistio, S.Sos.,M.A.P



Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si



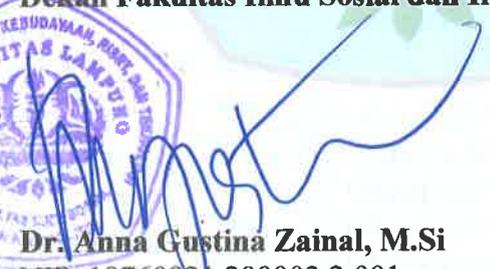
Penguji : Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si
NIP. 19760821 200003 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Desember 2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini muni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 12 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Raihan Adli
NPM 2016041005

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Krui Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 30 Oktober 2001. Dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana dari Bapak Sudarmantao (Alm) dan Ibu Mewalia Utama dan merupakan anak tunggal di dalam keluarga. Pada tahun 2007 Penulis mengawali pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak di TK Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Barat, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kampung Jawa tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Krui dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Kebangsaan Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) dan pernah menjadi ketua bidang hubungan luar (HUBLU). Pada masa Sekolah Menengah Pertama (SMA) penulis aktif dalam kegiatan seni musik tradisional Lampung, Penulis tergabung dalam Sanggar Seni Teluk Stabas Kabupaten Pesisir Barat berbagai lomba telah banyak penulis ikuti baik dari tingkat daerah maupun nasional, prestasi yang paling membanggakan bagi penulis adalah diundang sebagai penampil musik tradisional pada HUT RI ke-72 dan 73 di Istana Negara. Pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan KKN di Pekon Pemanar, Pesisir Barat dan mengikuti MBKM FISIP yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung selama 6 bulan.

MOTTO

**“Jadilah Baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berbuat baik”**

(Q.S Al Baqarah: 195)

“Have Courage and Be Kind”

(Raihan Adli)

**“Keramahtamahan Dalam Perkataan Menciptakan Keyakinan,
Keramahtamahan Dalam Pemikiran Menciptakan Kedamaian,
Keramahtamahan Dalam Memberi Menciptakan Kasih”**

(Lao Tse)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan rasa sayang dan juga rasa syukur, Aku persembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan terima kasih kepada:

KELUARGAKU TERCINTA

Ibu dan Ayah

Yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, nasihat baik dari segi moral maupun material yang tiada hentinya. Terima kasih untuk segala hal terbaik yang selalu diusahakan kepadaku hingga aku dapat mencapai tahap ini. Semoga ini menjadi pembuka langkah kesuksesanku dalam memberikan kalian kebahagiaan.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung, khususnya Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat, rahmat. Dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Wisata Pantai Labuhan Jukung”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada proses menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, masukan, saran, bantuan, dorongan, serta kritik dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, waktu, saran, masukan, serta bimbingan selama proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, waktu, dan juga saran, serta bimbingan yang diberikan dalam masa perkuliahan hingga sampai di tahap menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Susana Indriyati, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji skripsi penulis. Terima kasih untuk semua kritik, saran, serta masukan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi menjadi lebih baik.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas semua ilmu yang diberikan selama perkuliahan kepada penulis.

6. Seluruh staff Jurusan Administrasi Negara yang telah membantu penulis dalam proses administrasi studi sejak menjadi mahasiswa baru hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian untuk menyelesaikan skripsi penulis.
8. Untuk Kedua Orangtua ku tercinta, Almarhum Ayah dan Ibuku tersayang, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik untuk penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan perjuangannya yang selalu mengusahakan yang terbaik agar anaknya menjadi anak yang hebat. Doa terbaik selalu mengiringi kalian Ayah dan Ibuku tersayang. Untuk Almarhum Ayah tersayang terimakasih atas semua pelajaran berharga yang selama ini telah engkau ajarkan kepada penulis, walaupun engkau tidak bisa menemani sempat saat ini semoga kelak kita dipertemukan di surga Allah sebagai keluarga utuh. Untuk Ibuku tercinta terimakasih telah menjadi ibu yang hebat yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan nasehat kepada penulis, semoga ibu selalu diberi keberkahan dalam setiap langkahnya, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kepada Kakak dan Adik Sepupuku, Uda Arief, Wo Manda, Adek Dzafir, Wo Ira, Kakak Habib, Cengah Tasya, Adek Adzra, Adek Zaky, Adek Fatir, Adek Nadhif dan Adek Yusuf. Terima kasih telah menjadi kakak dan adek yang sangat baik bagi penulis, terimakasih atas doa, nasehat serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam segala situasi.
10. Kepada Seluruh Keluarga Besar Hi. Firdaus yang selama ini banyak membantu penulis dengan memberikan dukungan dan kasih sayang, Semoga om dan tante semua diberikan kesehatan dan umur yang berkah selama hidupnya.
11. Kepada teman seperjuangan sedari maba atau yang biasa disebut dengan PJ MABA, Dinda tri Adelia dan Annisa Zulvani. Terimakasih telah menjadi teman semasa perkuliahan dari tahun 2021 hingga sekarang ini kita ditahap mengerjakan skripsi. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang

menyakiti kalian berdua, semoga kalian sehat selalu dan diperlancar segala urusannya.

12. Kepada Tegass, Ibnu, Doni, Yu Alam, Ilham, Dickson terimakasih sudah menjadi bagian di tahap perjalanan penulis dan selalu saling menguatkan selama masa perkuliahan maupun ketika SMA hingga pada sampai saat ini.
13. Kepada teman perjuangan SMP Nedo, Farhan, Taufik, Rian Terimakasih sudah menjadi teman yang mengisi sebagian perjalanan hidup yang sangat asik, terimakasih telah menjadi partner bermain musik sejak SMP. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam setiap langkahnya.
14. Kepada Magang Bappeda, Jumadi, Rizki, Rintha, Trivena, Melisa terima kasih sudah selalu bersedia menemani sekaligus dijadikan tempat berbagi cerita dan menjadi hiburan penulis dengan celetukannya serta saling menguatkan satu sama lain.
15. Pengurus Inti Kabinet Meraki Himagara Periode 2023. Rizki, Dika, Riki, Yanuar, Jumadi, Valdo, Arsyah, Asipa, Dinda, Ajul, Octa, Atika, Jeje, Rintha, Amel, Devi. Terimakasih untuk dukungan yang selalu diberikan kepada penulis serta pengalamann dan kenangan selama penulis menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Luar.
16. Kepada Dika, Riki, Irza, Iqbal, Rizki, Yanuar, Abim, Rafi, Valdo, Arsyah, Jumadi, Tegar, Firdii dan teman-teman yang lainnya, terima kasih untuk pengawaknya dan candaan telah menghibur penulis sejak awal kuliah hingga saat ini.
17. Kepada Caya dan Alpi terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan perkuliahan ini dengan keseruan cerita dibaliknya.
18. Kepada teman-teman ADAMANTIA, terima kasih untuk setiap momen suka dan dukanya dan selalu saling membantu satu sama lain selama proses perkuliahan ini.
19. Kepada teman-teman KKN Pemancar, Saiful, Zaky, Dhea, Iftika, Zuyyina, Angel terima kasih sudah berbagi pengalaman dan cerita selama 40 hari dan menjadi bagian cerita di masa perkuliahan penulis.

20. Kepada teman-teman HUBLU 2023. Terimakasih atas bantuan serta informasi yang diberikan selama penulis menjabat sebagai sekretaris bidang, mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang menyakiti hati kalian. Dan terimakasih ada dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
21. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri Raihan Adli. Terimakasih telah menyelesaikan salah satu tanggung jawab yang terlihat sulit untuk diwujudkan ternyata bisa menjadi kenyataan. Semoga kedepannya, selalu diberikan keberkahan dalam meraih mimpi-mimpi besar lainnya. Terima kasih telah mampu untuk bertahan dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih telah berusaha dan menghargai diri sendiri atas semua proses kehidupan yang telah dilalui. Terima kasih sudah terus mencoba menjadi versi terbaik dan memberikan yang terbaik dalam hal apapun termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kamu selalu sehat dan diberikan keberkahan disetiap umurnya dan bahagia selalu agar dapat merayakan segala proses yang ada dihidupmu kelak. Terima kasih, Raihan!

Bandar Lampung, 12 Desember 2024

Penulis,

Raihan Adli

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Koordinasi	11
2.2.1 Definisi Koordinasi.....	11
2.2.2 Bentuk-bentuk Koordinasi.....	12
2.2.3 Ciri-ciri Koordinasi.....	13
2.2.4 Indikator indikator Koordinasi.....	14
2.2.5 Hambatan-hambatan dalam Koordinasi.....	18
2.2.6 Tujuan Koordinasi.....	19
2.3 Pariwisata	20
2.3.1 Pengertian Pariwisata.....	20
2.3.2 Destinasi Wisata.....	21
2.3.3 Jenis dan Macam Pariwisata	22
2.3.4 Pengembangan Pariwisata	24
2.4 Lingkungan Wisata	26
2.4.1 Kebersihan Lingkungan wisata.....	26
2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan lingkungan wisata.....	27
2.4.3 Dampak Negatif Sampah.....	29
2.5 Kerangka Pikir.....	31

III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
3.7 Teknik Keabsahan Data	41
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1 Kabupaten Pesisir Barat.....	45
4.1.2 Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.....	46
4.1.3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat	48
4.1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi	48
4.1.3.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	49
4.1.4 Pantai Labuhan Jukung.....	50
4.2 Hasil.....	54
4.2.2 Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Kawasan Wisata Pantai Labuhan Jukung.....	54
4.2.2 Faktor Penghambat Koordinasi dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Wisata Pantai Labuhan Jukung.....	74
4.3 Pembahasan	77
4.3.1 Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam Penanggulangan Sampah Pada Pantai Labuhan Jukung	78
4.3.2 Bentuk Koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penaanggulangan Sampah Pada Pantai Labuhan Jukung	95
4.3.3 Faktor Penghambat Koordinasi dalam Penanggulangan Sampah pada Pantai Labuhan Jukung.....	97
V. PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Jumlah Timbulan Sampah	3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3 Daftar Informan yang terkait dalam Penelitian	37
Tabel 4 Daftar Observasi.....	38
Tabel 5 Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian.....	38
Tabel 6 Luas Wilayah dan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat	45
Tabel 7 Tugas masing-masing Instansi	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Tanggapan Masyarakat tentang Sampah pada Pantai Labuhan Jukung	4
Gambar 2 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 3 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	41
Gambar 4 Pantai Labuhan Jukung	51
Gambar 5 Kegiatan Bersih-bersih oleh Petugas Kebersihan	58
Gambar 6 Kegiatan Bersih-bersih dengan Anak-anak Sekolah	59
Gambar 7 Rapat Koordinasi Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup.....	65
Gambar 8 Komunikasi Internal Petugas Kebersihan	66
Gambar 9 Fasilitas Kotak Sampah.....	69
Gambar 10 Mobil Pengangkut Sampah	70
Gambar 11 Absensi Petugas Kebersihan.....	73

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan didukung sumber daya alam yang beraneka ragam berpotensi untuk diolah dan dimanfaatkan. Selain itu negara Indonesia juga kaya akan seni budaya daerah, adat istiadat, peninggalan sejarah terdahulu dan yang tidak kalah menarik adalah keindahan panorama alamnya yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan baik. Kekayaan alam yang sangat melimpah ini jika dikelola dengan baik dapat menjadi destinasi wisata serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional (Yoeti, 2008). Hal yang harus diperhatikan agar wisata yang dimiliki tetap terjaga yaitu dengan adanya pengelolaan pariwisata yang baik dan benar.

Pengelolaan pariwisata jika tidak dilakukan dengan baik dan benar akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Pengaruh negatif terhadap aspek lingkungan yaitu adanya polusi udara, pencemaran air, serta penurunan kualitas lingkungan karena sampah disekitar kawasan wisata (Suzanna, 2013). Pengelolaan kebersihan lingkungan yang tidak baik dapat menimbulkan masalah sampah di kawasan pariwisata dan masuk kedalam sejenis sampah rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga wajib untuk dikelola yaitu dengan cara pengurangan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan menurut Undang-undang No. 18 tahun 2008.

Upaya yang dapat dilakukan agar sampah tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kawasan wisata adalah perlu menciptakan suatu tata kelola pariwisata yang baik agar terhindar dari dampak negatif yang berpengaruh terhadap lingkungan, maka seluruh pihak terkait yang

memiliki hubungan langsung dengan dunia pariwisata harus terlibat pihak-pihak tersebut adalah masyarakat, wisatawan dan pemerintah harus saling terpadu untuk berupaya secara maksimal dalam pengelolaan wisata (Amaruli, 2019).

Salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi pariwisata adalah kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dengan potensi pariwisata yang beragam yang terdiri dari wisata alam, wisata sejarah dan kuliner yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Objek wisata di Kabupaten pesisir Barat yang paling banyak dikunjungi ialah wisata pantai. Pantai Labuhan Jukung menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi karena merupakan salah satu pantai sentral yang berdekatan dengan kawasan ibukota kabupaten. Pantai Labuhan Jukung memiliki daya tarik karena memiliki hamparan pasir putih yang luas dan juga memiliki pemandangan indah serta ombak laut yang mampu memikat hati peselancar lokal maupun dunia dan juga cocok dijadikan sebagai lokasi untuk melihat sunset ketika sore hari (pesisirbaratkab.go.id diakses pada 18 Januari 2024).

Pantai Labuhan Jukung memiliki lokasi strategis dan dekat dengan keramaian membuat pantai ini banyak dikunjungi wisatawan dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menyediakan berbagai sarana penunjang pariwisata seperti tempat makan, tenda-tenda di pinggir pantai serta wahana bermain untuk anak-anak. Adanya fasilitas penunjang tersebut menjadi salah satu daya tarik yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung dan mengakibatkan peningkatan jumlah sampah konsumsi dan sampah bekas pakai yang dihasilkan wisatawan dan pedagang. Hal itu juga didukung dengan kurangnya kesadaran pelaku usaha maupun wisatawan asing dan domestik tentang kebersihan lingkungan. Ketidapatuhan wisatawan dan juga pedagang terhadap pedoman pengelolaan sampah adalah hal yang semakin

mengkhawatirkan dan terlihat secara nyata. (pesisirbaratkab.go.id diakses pada 18 Januari 2024).

Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan dengan Bapak Eko Yosep Nainggolan, S.S. selaku JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) Adhyatama Kepariwisata Ahli Madya mengatakan bahwa jumlah besaran sampah dikawasan wisata Pantai Labuhan Jukung setiap harinya mencapai 2 mobil L300 pada hari biasa dan dapat terjadi peningkatan drastis apabila kondisi cuaca sedang buruk, dikarenakan sampah kiriman yang terbawa oleh arus laut. Sampah laut merupakan sampah manufaktur yang memasuki lingkungan laut dari berbagai sumber. Sampah laut biasanya berupa sampah yang *inert* seperti plastik, kain, logam, *styrofoam*, dan kayu. Saat ini sampah plastik menjadi sampah yang dominan dari sampah laut (Register, 2007). Sampah laut maupun sampah rumah tangga, keduanya dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, penurunan estetika, serta pengurangan kenyamanan dan kesehatan. Laju timbulan sampah juga berasal dari akomodasi dan tempat makan yang meningkat di wilayah wisata berpotensi menyebabkan peningkatan beragam faktor yang dapat menyebabkan penyakit, seperti lalat dan tikus. Selain faktor penyakit, dapat terjadi pula resiko sampah terbakar yang berasal dari timbunan sampah (Sealey, 2014).

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat jumlah timbulan sampah pada tahun 2022 sejumlah 23.270,84 ton sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sejumlah 23.753,8 ton. Kabupaten Pesisir Barat menjadi kabupaten dengan persentase rendah untuk jumlah timbulan sampah per tahun yang dihasilkan oleh Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung. Berikut data jumlah timbulan sampah di pantai Labuhan Jukung dari tahun 2020-2022.

Tabel 1 Jumlah Timbulan Sampah

Jumlah Timbulan Sampah		
2020	2021	2022
1.800 ton	1.950 ton	2.225 ton

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Kondisi tersebut tidak menjadikan Kabupaten Pesisir Barat terlepas dari ancaman sampah, masih ada beberapa tempat yang turut menyumbangkan sampah yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Salah satu wilayah tersebut adalah kawasan wisata Pantai Labuhan Jukung.

Tidak hanya penumpukkan sampah yang peneliti temukan saat observasi pra penelitian, tetapi ada beberapa tanggapan masyarakat maupun wisatawan yang mengeluhkan banyaknya tumpukkan sampah yang ada di pantai labuhan jukung. Dengan ini terdapat beberapa keluhan masyarakat yang ada di media sosial diantaranya:



Gambar 1 Tanggapan Masyarakat tentang Sampah pada Pantai Labuhan Jukung

Sumber: Kupas_tuntas.co 2021

Dari beberapa fakta yang peneliti temukan maka perlu adanya koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup aparat pemerintah, dalam pengelolaan kebersihan lingkungan dan ekosistem di lokasi wisata pantai labuhan jukung agar terciptanya tempat wisata yang tidak hanya memiliki keindahan laut saja tetapi memiliki keindahan ekosistem dan lingkungan terkhusus di pantai labuhan jukung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 11 Tahun 2021 pasal 15 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan sampah kawasan

permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menjadi tanggung jawab pengelola kawasan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan kebersihan lingkungan di kawasan Pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat, akan tetapi Dinas Pariwisata memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya berupa tenaga kebersihan dan fasilitas dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di pantai Labuhan Jukung. Maka dari itu perlu adanya koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan kebersihan lingkungan agar masalah kebersihan lingkungan yang ada di pantai Labuhan Jukung dapat terselesaikan.

Mewujudkan upaya optimalisasi dalam program pemerintah, maka diperlukannya koordinasi. Menurut (Handoko, 2003) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (*departemen*) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pengelolaan kebersihan lingkungan pada kawasan wisata merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah yaitu Dinas Pariwisata sebagai penanggung jawab kawasan wisata dan pengelola Pantai Labuhan Jukung, namun diperlukannya koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan kebersihan lingkungan pada Pantai Labuhan Jukung.

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan, maka peneliti akan menganalisis masalah mengenai Koordinasi Dinas Pariwisata dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata Pantai Labuhan Jukung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat nantinya dalam melakukan pengelolaan kebersihan lingkungan di pantai Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Koordinasi Dinas Pariwisata Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pesisir Barat Dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Wisata Pantai Labuhan Jukung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata Pantai Labuhan Jukung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada koordinasi pengelolaan kebersihan lingkungan wisata Pantai Labuhan Jukung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penulis dapat merumuskan tujuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Memperoleh analisa secara mendalam tentang Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata Pantai Labuhan Jukung.
2. Teridentifikasinya kendala koordinasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata Pantai Labuhan Jukung.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan untuk memperkaya ilmu pengetahuan terkhusus dalam domain administrasi negara ataupun masyarakat umum yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan lingkungan kawasan wisata Pantai Labuhan Jukung.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan kebersihan lingkungan khususnya pada kawasan wisata di Kabupaten Pesisir Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Rijal, 2019) Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Kota Makassar	Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Koordinasi menurut (Syafiie & Welasari, 2015) dengan melihat beberapa unsur yaitu pengaturan, sinkronisasi, kepentingan bersama, dan tujuan bersama.	Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara kedua instansi tersebut masih kurang optimal dan koordinasi antara kedua lembaga tersebut belum efektif dalam menangani kemacetan. Terlihat saat terjadinya kemacetan, kuantitas petugas dalam mengatur lalu lintas di lapangan sedikit. Hal tersebut berdampak pada belum adanya solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah kemacetan.
2	(Azmi, 2022), Koordinasi Dinas Pariwisata Dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Dalam Pengembangan Kepariwisata Di Kabupaten Ciamis	Menganalisis koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori koordinasi menurut (Hartatmo, 2015).	Koordinasi yang dibangun oleh Kepala Bidang Pemasaran Dinas pariwisata dengan Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Ciamis, masih belum dapat terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dengan kurang instensifnya kerjasama antar dua bidang tersebut, sehingga target pengembangan kepariwisataan belum tercapai.

3	(Andry Hendry, Herman, Rahmah Junaini 2023) Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance)	Menganalisis pelaksanaan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam penghapusan asset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (<i>ambulance</i>). Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori koordinasi menurut (Handyaningrat, 1989).	Koordinasi antara kedua intansi telah dilakukan, namun masih terdapat hal-hal yang belum berjalan maksimal diantaranya adalah koordinasi mempersiapkan surat-surat kendaraan baik sebelum dihapus maupun telah dihapus, komunikasi yang lebih instensif, kemampuan pegawai, partisipasi secara maksimal. Kedua intansi harus berperan lebih maksimal dengan cara meningkatkan kinerjanya dalam rangka melakukan koordinasi agar apa yang telah ditentukan akan tercapai secara maksimal.
---	---	---	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah di paparkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta memiliki fokus penelitian yaitu Koordinasi. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan lokasi penelitian yang ada pada penelitian ini akan dilakukan Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dan Pantai Labuhan Jukung. Teori yang akan digunakan untuk menganalisis koordinasi pada penelitian ini menggunakan dimensi koordinasi menurut Hasibuan dalam (Sugihartatmo, 2015) dan Handyaningrat dalam (Andini, 2022). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata Pantai Labuhan Jukung. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata Pantai Labuhan Jukung.

Menurut Stoner dalam (Hani, 2009) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang juga merupakan fungsi dari manajemen itu sendiri, dalam mewujudkannya upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jika melihat pengertian manajemen menurut ahli dijelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan melalui fungsi-fungsi manajemen dan diterapkan melalui kerjasama anggota organisasi ataupun antar organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.

Fungsi-fungsi manajemen menurut (Robbins, 2005) yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian, sebagai berikut.

- 1) Perencanaan (*planning*) Fungsi Perencanaan adalah kegiatan manajemen yang meliputi penetapan tujuan, penetapan strategi, dan mengembangkan rencana yang berguna untuk mengoordinasikan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*) Fungsi Pengorganisasian adalah kegiatan manajemen yang melibatkan pengaturan dan pembagian pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian meliputi pembagian kerja antara kelompok dan individu, pengorganisasian terkait kegiatan kelompok dan individu, serta penetapan kewenangan manajerial.
- 3) Fungsi Kepemimpinan (*leading*) Fungsi Kepemimpinan adalah kegiatan manajemen yang kegiatannya meliputi memotivasi, memimpin, dan melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.

- 4) Pengendalian (*controlling*) Fungsi Pengendalian adalah fungsi manajemen yang kegiatannya meliputi pemantauan, membandingkan, dan mengevaluasi atas hasil kinerja.

Pada penelitian ini koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Koordinasi mempunyai sasaran yang sangat penting karena dapat mengarahkan semua tindakan serta memberikan sumbangan kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan. Dengan koordinasi, manajemen suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar. Tanpa koordinasi, individu-individu dan unit-unit yang ada akan kehilangan pegangan atas peranan mereka.

2.2 Koordinasi

2.2.1 Definisi Koordinasi

Koordinasi merupakan proses penyatuan tujuan serta tindakan dalam satuan-satuan yang terpisah (*departemen*) guna mencapai tujuan secara efisien (Makalew, 2021). Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi dan juga antar organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Didukung oleh pengertian koordinasi menurut Hasibuan dalam (Sugihartatmo, 2015) yaitu kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Siagian dalam (Nafia, 2021) bahwa koordinasi merupakan kegiatan yang menyatukan berbagai kegiatan yang saling berbeda-beda akan tetapi mempunyai tujuan yang saling berhubungan. Sasaran utama koordinasi adalah untuk menciptakan "*unity action*" yang pada gilirannya akan menjamin keterpaduan pelaksanaan dan

sekaligus meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerjasama komponen yang terlibat.

Pendapat tersebut didukung oleh Terry dalam (Hasibuan, 2009) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut (Manullang, 2008) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu kegiatan mengarahkan mengintegrasikan tujuan dan tindakan pada satuan satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.2 Bentuk-bentuk Koordinasi

Kebutuhan akan koordinasi tidak dapat dihindarkan karena setiap instansi memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, terjadinya ketergantungan antar instansi dan hal tersebut dapat menyebabkan koordinasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan bersama. Adapun bentuk-bentuk koordinasi menurut (Hasibuan, 2009) dibagi menjadi dua yaitu, Koordinasi vertikal dan Koordinasi horizontal yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi

vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur.

- b. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*.

Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara *intern* maupun ekstra pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara *intern* atau *ekstern* yang levelnya setaraf.

Dengan demikian dari beberapa pendapat ahli tentang bentuk-bentuk koordinasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi terbagi menjadi beberapa bentuk. Dengan begitu hal tersebut dapat mempermudah dalam mengidentifikasi koordinasi yang terjadi termasuk kedalam salah satu bentuk yang telah di sebutkan.

2.2.3 Ciri-ciri Koordinasi

Adapun ciri-ciri koordinasi menurut Handayani (2022) dalam (Tololiu, 2022) yaitu:

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Terciptanya koordinasi karena adanya seorang pemimpin atau koordinator yang mengarahkan serta mengintegrasikan seluruh kegiatan atau aktivitas antar instansi.
2. Koordinasi merupakan suatu bentuk usaha kerja sama. Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kerja sama merupakan syarat mutlak dalam terselenggaranya koordinasi sebaik-baiknya.

3. Koordinasi bersifat ada terus menerus. Dalam melaksanakan koordinasi tentu harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Koordinasi tentu dilaksanakan oleh pihak-pihak secara berkelompok untuk bekerja sama secara teratur agar dapat mencapai tujuan bersama.
5. Kesatuan tindakan, dalam terciptanya koordinasi harus adanya keselarasan kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
6. Tujuan bersama. Keselarasan tindakan tentu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkoordinasi sehingga harus adanya kesadaran bagi semua pihak untuk ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama sebagai satu kesatuan kelompok.

2.2.4 Dimensi Koordinasi

Dimensi dalam koordinasi pada penelitian ini yang dijadikan tolak ukur dalam koordinasi. Menurut Hasibuan dalam (Sugihartatmo, 2015) terdapat dimensi koordinasi, sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan salah satu dimensi koordinasi dimana hal itu memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik, pimpinan dapat mengatur jadwal waktu agar kesatuan usaha dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam terselenggaranya koordinasi yang baik. Dengan melaksanakan komunikasi antar instansi atau badan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara bersama-sama. Ketika komunikasi yang terjalin di dalam koordinasi sudah baik, tentu akan terjadinya sinkronisasi baik informasi maupun kegiatan. Menurut (Hasibuan, 2006) syarat komunikasi yang baik yaitu :

- a) Disampaikan pada waktu dan kondisi yang tepat
- b) Terjadinya komunikasi dua arah
- c) Disampaikan secara jelas dengan menghindari hambatan-hambatan komunikasi

Dengan demikian, jika komunikasi sudah terjalin dengan baik tujuan yang telah ditetapkan secara bersama dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya.

3. Pembagian Kerja

Menurut (Limanik, 2021) menyatakan bahwa di dalam dimensi pembagian kerja ini setiap pihak harus melaksanakan tugas yang sudah disepakati dan ditentukan dengan baik sebab dengan adanya pembagian kerja ini tentu dapat berfungsi dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Dalam mengatasi permasalahan yang kompleks maka dibutuhkannya koordinasi antar instansi. Dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tentu satu instansi saja tidak cukup maka dibutuhkannya instansi lain untuk membantu serta berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama secara efisien. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan bersama harus dilakukannya pembagian kerja antar individu atau kelompok sebagai bentuk kerja sama secara kooperatif dan dikoordinasikan dalam mencapai tujuan bersama. Pembagian kerja memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

4. Disiplin

Dalam terciptanya tujuan penyelenggaraan koordinasi tentu harus dibutuhkannya sikap disiplin bagi semua instansi atau anggota dalam melaksanakan wewenang atau tugasnya secara sungguh-sungguh. Adanya sikap disiplin pada setiap instansi tentu dapat memberikan sumbangan dalam tercapainya tujuan (Asri, 2019). Menurut (Sugihartatmo, 2015) untuk mencapai tujuan secara maksimal, diperlukannya kedisiplinan kerja yang tinggi baik dalam disiplin waktu, administrasi, dan ketaatan terhadap mekanisme dan prosedur. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Leonard dalam (Asri, 2019) bahwa koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang tepat sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu maka diperlukan sikap disiplin.

Menurut Handayaninigrat dalam (Andini, 2022) indikator yang dapat mengukur koordinasi yaitu, sebagai berikut:

1. Komunikasi
 - a) Ada tidaknya informasi
 - b) Ada tidaknya alur informasi
 - c) Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a) Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b) Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
 - a) Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b) Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - a) Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b) Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c) Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan

- d) Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
- 5. Kontinuitas Perencanaan
 - a) Ada tidaknya umpan balik dari objek dan subjek pembangunan
 - b) Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Berdasarkan uraian diatas maka pada penelitian ini koordinasi antar lembaga ditinjau dengan dimensi dimensi yang ada di dalam koordinasi, sebagai berikut:

1. Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas Perencanaan merupakan proses perencanaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Kontinuitas Perencanaan penting karena dapat melihat ada atau tidaknya umpan balik (*feedback*) dari objek maupun subjek yang berkoordinasi yang digunakan untuk memastikan bahwa pihak yang berkoordinasi dapat melakukan kegiatan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Kontinuitas Perencanaan pada koordinasi penting dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman, menyusun rencana kegiatan dan menetapkan jadwal pelaksanaan serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

2. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan salah satu dimensi koordinasi dimana hal itu memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Pada dimensi kesatuan tindakan dapat dilihat dengan ada tidaknya pejabat berwenang yang terlibat dan ada tidaknya kesepakatan terhadap kegiatan.

3. Komunikasi antar lembaga

Komunikasi antar lembaga adalah proses pertukaran informasi antar lembaga. Tujuan dari komunikasi antar lembaga adalah untuk memastikan adanya keselarasan dalam tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Pada dimensi komunikasi dapat diukur dengan ada tidaknya kejelasan informasi yang disampaikan, ada tidaknya alur informasi dan ada tidaknya teknologi informasi yang digunakan.

4. Pembagian kerja antar lembaga

Pembagian kerja antar lembaga adalah proses pengaturan tugas, tanggung jawab, dan peran antar lembaga dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan bersama harus dilakukannya pembagian kerja antar lembaga yang mencakup ada tidaknya bentuk kerjasama atau kesepakatan yang terjadi dan ada tidaknya pelaksanaan kegiatan.

5. Disiplin

Tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan koordinasi harus dibutuhkannya sikap disiplin bagi semua instansi atau anggota dalam melaksanakan wewenang atau tugasnya secara sungguh-sungguh. Sikap disiplin pada setiap instansi dapat memberikan sumbangan dalam tercapainya tujuan. Untuk mencapai tujuan secara maksimal, diperlukannya kedisiplinan kerja yang tinggi baik dalam disiplin waktu, administrasi, dan ketaatan terhadap mekanisme dan prosedur.

2.2.5 Hambatan-hambatan dalam Koordinasi

Adapun hal-hal yang biasanya menjadi permasalahan atau hambatan dalam melaksanakan koordinasi, antara lain (Efendi, 2019)

1. Setiap pihak kurang menyadari bahwasanya kegiatan yang dilakukan hanya sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan
2. Setiap pihak yang berkoordinasi sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain
3. Terdapat pembagian kerja yang berlebihan
4. Kurang jelasnya informasi terkait rumusan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak instansi
5. Pihak-pihak yang berkoordinasi tidak mengerti dengan jelas terkait prosedur dan kerja dalam mencapai tujuan
6. Seorang pemimpin tidak memiliki kewibawaan, kecakapan, dan wewenang dalam menjalankan koordinasi
7. Tidak atau kurangnya forum diskusi yang dilakukan oleh setiap instansi dalam bertukar informasi dan menciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerja sama

2.2.6 Tujuan Koordinasi

Koordinasi merupakan bentuk kerja sama antar badan atau instansi atau unit-unit organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama. Kesuksesan dalam pelaksanaan koordinasi tentu akan menciptakan keharmonisan dan keselarasan aktivitas yang ada sehingga hal tersebut dapat berdampak pada pencapaian sasaran secara efisien (Sugihartatmo, 2015). Sedangkan menurut (Priyono, 2008) diadakannya koordinasi antar institusi yaitu bertujuan untuk penyatuan pendapat di dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, serta pembagian tugas dari masing-masing pihak agar setiap anggota yang berkoordinasi dapat memahami tujuan tim dan terciptanya komitmen satu sama lain. Sesuai dengan pendapat (Sinaga, 2023) dilaksanakannya koordinasi memiliki tujuan agar tugas maupun wewenang setiap instansi dapat terlaksana dengan aman, lancar, tertib serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini selaras dengan pendapat (Hasibuan, 2009) yang menyatakan bahwa koordinasi sangat menentukan terselenggaranya usaha yang telah

diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tetapi apabila koordinasi tidak dilaksanakan atas departemen dan pembagian kerja akan menimbulkan organisasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan arah. Adapun indikator dari tujuan koordinasi yaitu:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

2.3 Pariwisata

2.3.1 Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut (Meyers, 2009) Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap ataupun mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, ataupun liburan.

Menurut Spillane dalam (Dedi, 2019) Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau

keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

Jika melihat pengertian pariwisata menurut Undang- Undang dan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang melakukan kegiatan diluar untuk mencari kebahagiaan dengan suasana alam, lingkungan yang berbeda dari tempat tinggal mereka. Dan pariwisata memiliki kaitan yang erat dengan organisasi, hubungan antar kelembagaan, kebutuhan layanan, dan sebagainya.

2.3.2 Destinasi Wisata

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009 Pasal 1 ayat 6, Destinasi pariwisata atau daerah tujuan pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Berdasarkan pernyataan undang-undang diatas menyatakan bahwa daerah tujuan wisata merupakan kawasan geografis yang memiliki daya tarik dalam menarik kunjungan wisatawan pada suatu objek maupun destinasi.

Destinasi wisata menurut (UNWTO, 2007) *United Nation World Tourism Organization* adalah ruang fisik dengan batas geografis yang dikenali oleh pengunjung, yang mencakup atraksi, infrastruktur, layanan, dan komunitas lokal yang menyatu untuk menciptakan pengalaman wisata.

Menurut (Kotler, 2010) menjelaskan bahwa destinasi wisata merupakan tempat dengan bentuk yang memiliki batasan nyata atau berdasarkan persepsi, baik berupa batasan secara fisik, secara politik, atau berdasarkan pasar.

Menurut pengertian destinasi pariwisata menurut undang-undang dan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa destinasi pariwisata merupakan sebuah daerah atau tempat yang secara geografis yang terdapat daya tarik pariwisata dan dapat menarik wisatawan untuk datang berwisata.

2.3.3 Jenis dan Macam Pariwisata

Terdapat berbagai jenis dan macam pariwisata menurut (Yoeti, 2017) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut letak geografis,
 - a). Pariwisata lokal, yaitu jenis pariwisata semacam ini adalah pariwisata setempat, yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.
 - b). Pariwisata regional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu tempat atau daerah yang ruang lingkungnya lebih luas dibandingkan dengan “*local tourism*”, tetapi lebih sempit jika dibandingkan dengan “kepariwisataan nasional” (*national tourism*).
 - c). Kepariwisataan nasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam suatu wilayah, suatu negara, selain kegiatan “*domestic tourism*” juga dikembangkan “*foreign tourism*” dimana didalamnya termasuk “*in bound tourism*” dan “*out going tourism*”
 - d). *Regional Internasional Tourism*, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu wilayah internasional, yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut.
 - e). *Internasional Tourism*, pengertian ini sinonim dengan kepariwisataan yang berkembang diseluruh negara di dunia, termasuk didalamnya, selain “*Regional International Tourism*” juga kegiatan “*National Tourism*”
2. Menurut alasan/tujuan perjalanan, *bussines tourism, vacationl tourism, educational tourism*.

3. Menurut saat atau waktu berkunjung, *seasonal tourism, occasional tourism*
4. Menurut objeknya, *cultural tourism, recuperational tourism, commercial tourism, sport tourism, political tourism, social tourism, religion tourism*.

Menurut (Ismayanti, 2010), berdasarkan jenis-jenis objek wisatanya, pariwisata dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Wisata Pantai: kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan parasarana akomodasi, makan dan minum.
2. Wisata Etnik: wisata perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
3. Wisata Cagar Alam: wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa di pegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.
4. Wisata Buru: wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
5. Wisata Olahraga: wisata ini memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata. Kegiatan dalam wisata ini dapat berupa kegiatan olahraga aktif yang mengharuskan wisatawan melakukan gerak olah tubuh secara langsung. Kegiatan lainnya dapat berupa kegiatan olahraga pasif.
6. Wisata Kuliner: motivasi dalam jenis wisata ini tidak semata-mata hanya untuk menyenangkan dan memanjakan perut dengan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, melainkan pengalaman yang menarik juga menjadi motivasinya. Pengalaman makan dan memasak dari aneka ragam makanan khas tiap daerah membuat pengalaman yang didapat menjadi lebih istimewa.

7. Wisata Religius: wisata ini dilakukan untuk kegiatan yang bersifat religi keagamaan, dan ketuhanan.
8. Wisata Budaya: peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat bersejarah lainnya.

2.3.4 Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan dampak dan manfaat yang dihasilkan dari pariwisata, maka dalam proses pengembangan pariwisata harus sangat memperhatikan strategi apa yang akan dilakukan kedepannya. Pengembangan menurut (Swarbrooke, 1996) merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai macam sumber daya pariwisata.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 7 menjelaskan bahwa pengembangan kepariwisataan mencakup kelembagaan kepariwisataan, dan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Dalam pengembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Perlu adanya sebuah ketetapan peraturan yang bertujuan pada peningkatan terhadap mutu pelayanan dan kelestarian lingkungan wisata.
2. Pengelola setempat juga harus melibatkan masyarakat setempat.
3. Kegiatan proposi yang dilakukan juga harus seragam.
4. Perlu menentukan daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan dibanding daerah lainnya.
5. Pemerintah pusat melakukan kerjasama kalangan swasta maupun pemerintah daerah setempat.
6. Perlu adanya pemerataan arus wisatawan.

7. Mengajak masyarakat setempat agar menyadari fungsi, peran, dan manfaat pariwisata.
8. Sarana dan prasarana harus dipersiapkan dengan baik.

Pengembangan kepariwisataan tidak luput dari pembangunan berkelanjutan, menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan pasal 5 menyatakan bahwa Pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata. Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, sebagaimana dikemukakan Sobari dalam (Anindita, 2015), yaitu:

1. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.
2. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.
3. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.
4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Dengan demikian pengembangan pariwisata perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan

(sumber daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran peningkatan kualitas hidup.

2.4 Lingkungan Wisata

2.4.1 Kebersihan Lingkungan wisata

Undang-undang No. 23 tahun 1992 pasal 22 menjelaskan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat maka kebersihan lingkungan harus diutamakan. Menurut (Iskandar, 2018) bahwa kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum.

Menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya disekitar tempat tinggal saja tetapi menjaga kebersihan lingkungan juga dilakukan di tempat umum seperti kawasan wisata. Menjaga kebersihan lingkungan wisata sangat penting dilakukan karena hal tersebut dapat menjaga kenyamanan pengunjung dan melestarikan keindahan alam serta ekosistem yang ada. Lingkungan wisata yang bersih dapat meningkatkan pengalaman wisatawan, mendorong kunjungan ulang, dan dapat mendukung promosi tempat wisata yang dikunjungi. Menurut (Dedi, 2019) pentingnya perencanaan ruang yang mempertimbangkan kapasitas lingkungan dalam pengembangan destinasi wisata, karena kebersihan lingkungan wisata dapat terjaga jika pembangunan dilakukan sesuai daya dukung lingkungan dan disertai infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

Dapat disimpulkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan wisata merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena menjaga kebersihan lingkungan wisata tidak hanya dilakukan untuk membuat kenyamanan kepada wisatawan tetapi juga ikut melestarikan keindahan alam serta ekosistem yang ada agar terciptanya lingkungan wisata yang bersih, nyaman dan terbebas dari sampah.

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan lingkungan wisata

Kebersihan lingkungan wisata sangat penting karena mempengaruhi daya tarik, kenyamanan, dan pengalaman pengunjung, serta kelestarian alam di sekitar tempat wisata tersebut. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kebersihan di lingkungan wisata menurut (Darmawan, 2016), adalah:

1. Pengelolaan Sampah yang baik

- a) Adanya Fasilitas Tempat Sampah yaitu Menyediakan tempat sampah yang memadai, terutama yang memisahkan sampah organik, anorganik, dan berbahaya.
- b) Adanya Pengangkutan Sampah Rutin yaitu Melakukan pengangkutan sampah secara berkala untuk mencegah penumpukan.
- c) Pengolahan Sampah Memiliki sistem pengolahan sampah yang efektif, termasuk daur ulang dan pengolahan limbah organik.

2. Pengetahuan dan Sikap Wisatawan

- a) Wisatawan yang memiliki pengetahuan tentang kebersihan dan pelestarian lingkungan yang baik mengenai pentingnya menjaga lingkungan cenderung lebih sadar dalam menjaga kebersihan. Pengetahuan ini bisa mencakup pemahaman tentang dampak negatif sampah terhadap ekosistem dan pentingnya daur ulang.
- b) Wisatawan yang memiliki sikap pelestari lingkungan akan berdampak positif terhadap lingkungan, seperti kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian alam, juga mempengaruhi perilaku wisatawan dalam menjaga kebersihan tempat wisata.

3. Memiliki petugas kebersihan yang memadai

- a) Menyediakan petugas kebersihan yang siap menjaga kebersihan dan melakukan kegiatan bersih-bersih area wisata setiap saat, terutama di area yang sering dikunjungi.

- b) Petugas kebersihan yang melakukan patroli rutin untuk memeriksa kebersihan dan menangani sampah yang berserakan.
4. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terkait kebersihan, seperti sanksi untuk pembuang sampah sembarangan dan himbauan tentang kebersihan kawasan wisata akan mempengaruhi perilaku wisatawan dan pengelola dalam menjaga kebersihan lingkungan wisata.
5. Perilaku wisatawan dalam membuang sampah juga menjadi faktor penting. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat merusak keindahan dan daya tarik tempat wisata. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran lingkungan kepada wisatawan sangat diperlukan.

Jika melihat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebersihan lingkungan yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebersihan lingkungan menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan wisatawan. Pengelolaan kebersihan lingkungan wisata sangat dibutuhkan untuk kenyamanan para pengunjung dan juga dapat menjaga kawasan wisata dari masalah sampah.

Adapun pendapat menurut (Bakar, 2014) beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sampah antara lain:

1. Jumlah penduduk dapat menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah sampah karena semakin banyak penduduk, semakin banyak pula sampahnya.
2. Keadaan sosial ekonomi berpengaruh terhadap jumlah sampah karena semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang tiap harinya.

Kemajuan teknologi dapat berpengaruh terhadap kenaikan jumlah sampah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang

semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya.

2.4.3 Dampak Negatif Sampah

Menurut Gelbert dalam (Harahap, 2017) ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu:

1. Dampak Terhadap Kesehatan Sampah yang tidak ditangani dengan baik merupakan tempat berkembang dan bersarang yang baik bagi beberapa organisme seperti: kuman, bakteri, lalat, kecoa, tikus yang dapat menjangkitkan penyakit seperti: diare, kolera, tifus, penyakit demam berdarah, penyakit jamur kulit, dan lain-lain.
2. Dampak Terhadap Lingkungan wisata ialah dapat menyebabkan polusi air dan tanah. Sampah yang dibuang sembarangan dikawasan wisata maupun di sekitar kawasan wisata dapat menyebabkan pencemaran air yang menyebabkan gangguan bagi kehidupan berbagai organisme yang hidup disungai serta di laut. Sampah yang tertimbun di aliran sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan. Selain itu sampah yang dibuang sembarangan terutama sampah non organik dapat menyebabkan polusi tanah dan mengurangi tingkat kesuburan tanah. Sampah juga disinyalir sebagai salah satu pemicu dari pemanasan global, karena timbunan dan pembusukan sampah dapat menghasilkan gas metana (CH₄) dan karbon dioksida (CO₂) yang dapat merusak lapisan atmosfer bumi.
3. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi Sampah yang berserakan dapat mengurangi nilai keindahan suatu tempat. Keberadaan sampah serta bau yang ditimbulkan dapat mengurangi kenyamanan masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung.

Apabila pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan maka akan dapat menimbulkan

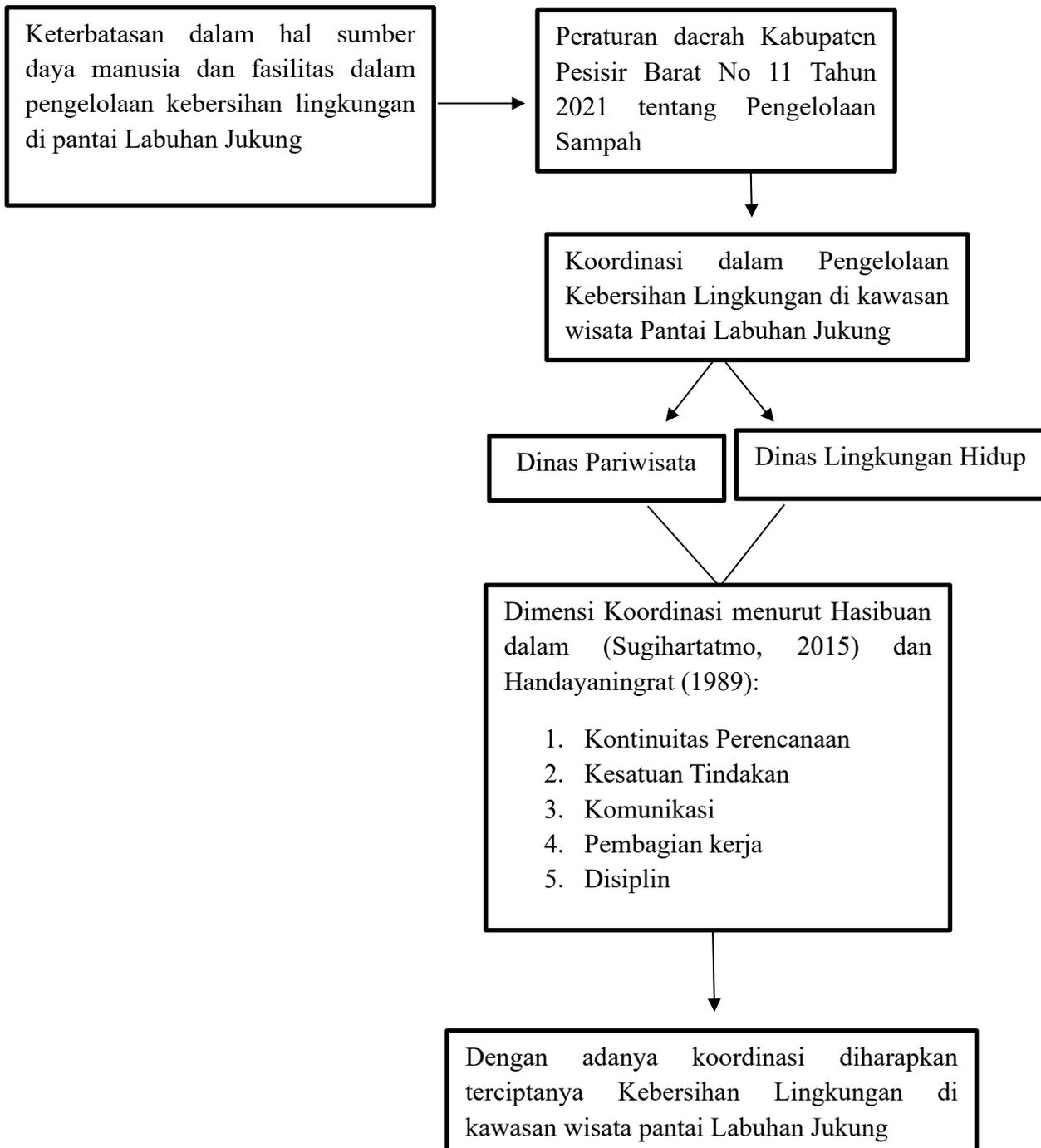
berbagai dampak negatif. Dampak-dampak tersebut menurut (Alex, 2011) adalah sebagai berikut:

1. Dampak terhadap kesehatan adalah dapat menjadi tempat berkembang biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia.
2. Dampak terhadap lingkungan dapat menyebabkan mati atau punahnya flora dan fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon.
3. Dampak terhadap sosial ekonomi yaitu menyebabkan timbulnya bau busuk, pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata seperti bencana banjir

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan kebersihan lingkungan wisata sangat penting untuk dilakukan karena kebersihan lingkungan di kawasan wisata memiliki pengaruh terhadap tingkat kenyamanan pengunjung. Apabila kebersihan lingkungan wisata tidak dijaga dan dikelola dengan baik maka akan memiliki dampak seperti adanya penumpukan sampah di kawasan wisata yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung. Dampak negatif sampah sangat banyak karena dapat berdampak pada lingkungan, dan juga keadaan sosial ekonomi. Jika melihat dari segi aspek lingkungan sampah yang dibuang secara sembarangan dapat menyebabkan polusi air dan tanah. Sampah yang dibuang di kawasan wisata maupun di sekitar kawasan wisata seperti sungai yang dekat dengan area wisata akan menyebabkan pencemaran air yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem yang ada di laut dan dikawasan wisata, jika dikaitkan dengan sosial keberadaan sampah seperti di tempat wisata dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dalam berkunjung ke suatu tempat wisata.

2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan teori yang telah dijelaskan, maka dapat di rumuskan kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan acuan penulis untuk membuat batasan-batasan dalam proses penelitian agar bisa memfokuskan kepada suatu masalah yang akan diteliti. Pantai Labuhan Jukung merupakan pantai yang paling sering dikunjungi di Kabupaten Pesisir Barat. Banyaknya minat wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Labuhan Jukung ini tentunya berbanding lurus dengan pengelolaan kepada kawasan wisata berupa pengelolaan kebersihan lingkungan, karena jika pengelolaan kebersihan lingkungan tidak dilakukan maka dapat menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu berupa sampah, baik sampah bawaan pengunjung, sampah pedagang yang berjualan disekitar kawasan Pantai Labuhan Jukung, dan sampah alam bawaan dari hulu sungai yang berdekatan dengan kawasan pantai Labuhan Jukung. Permasalahan sampah ini tentunya akan terus terjadi dan melonjak apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait pengelolaan kebersihan lingkungan di Pantai Labuhan Jukung. Berdasarkan penjelasan teori yang dijelaskan, maka dapat di rumuskan kerangka berpikir seperti yang tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 2 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan jenis penelitian kualitatif ini dengan harapan dapat menghasilkan suatu penjelasan yang rinci baik secara verbal, nonverbal, maupun perilaku berdasarkan observasi dari individu, kelompok ataupun instansi tertentu. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Untuk mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik maka penulis harus mengumpulkan data dan fakta yang terjadi atas fenomena yang akan peneliti teliti dari berbagai sumber lalu melihatnya dengan teori yang sudah ada dan bisa mendapatkan hasil yang berkaitan dengan Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Wisata Pantai Labuhan Jukung.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis wawancara-wawancara yang mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terkait Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Wisata Pantai Labuhan Jukung.

3.2 Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini difokuskan agar memberi batasan pada ruang lingkup penelitian dan bertujuan untuk mengarahkan penelitian yang lebih terfokus dan terarah. Fokus penelitian juga untuk memberikan batasan dalam lingkup studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang menjadi tujuan awal dalam penelitian yang bersifat umum. Fokus dalam penelitian ini yaitu pada Koordinasi Dinas

Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata pantai labuhan jukung.

Guna mengetahui Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata Pantai Labuhan Jukung. Peneliti menganalisis menggunakan dimensi koordinasi menurut Hasibuan dalam (Sugihartatmo, 2015) dan Handayani dalam (Andini, 2022) , sebagai berikut:

1. Dimensi koordinasi yang terdiri dari perencanaan koordinasi, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin.

a). Kontinuitas Perencanaan dalam Koordinasi

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pihak yang berkoordinasi yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan umpan balik terhadap perencanaan yang telah di sepakati dengan tujuan untuk melihat ada atau tidaknya umpan balik (*feedback*) dari objek maupun subjek.

b). Kesatuan Tindakan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan

Menganalisis dan mendeskripsikan instansi yang melakukan koordinasi yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan kesatuan tindakan dengan cara bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan

c). Komunikasi yang terjalin antar unit yang berkoordinasi

Menganalisis Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga menganalisis komunikasi yang dibangun oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata pantai Labuhan Jukung.

d). Pembagian Kerja antar unit yang berkoordinasi

Menganalisis peran dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan dilakukan oleh setiap instansi yang dilakukan bersama dan sesuai dengan kemampuan masing masing instansi untuk

penanganan masalah kebersihan lingkungan pada Pantai Labuhan Jukung

e). Disiplin petugas

Menganalisis bentuk pendisiplinan yang dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing instansi kepada petugas kebersihan mengenai disiplin terhadap waktu, administrasi dan ketaatann terhadap prosedur.

2. Kendala yang menjadi penghambat pada koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata pantai Labuhan Jukung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah Pantai Labuhan Jukung yang terletak di daerah kabupaten Pesisir Barat. Pantai Labuhan Jukung merupakan salah satu pantai yang menjadi destinasi tujuan wisata yang termasuk kedalam wisata internasional karena pantai labuhan jukung banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini menjadikan Pantai labuhan Jukung sebagai salah satu tempat wisata yang ramai sehingga memerlukan pengelolaan terhadap kebersihan lingkungan di kawasan pantai labuhan jukung. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena pantai Labuhan Jukung adalah tempat wisata yang masih berproses dalam melakukan pengelolaan kebersihan lingkungan wisata.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Ditinjau dari jenis penelitian, maka pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari penelitian langsung kepada objek dengan teknik catatan ilmiah, wawancara langsung, serta dokumentasi resmi lainnya. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama tempat objek penelitian dilakukan. Menggunakan hasil wawancara dengan tanya jawab langsung terhadap objek tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dalam memberikan data kepada pengumpul data dengan cara mengutip dari sumber-sumber lain seperti buku, peraturan tertulis, undang-undang maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting agar dapat memperoleh data secara akurat dan terperinci. Cara ataupun teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), dokumentasi dan lain sebagainya (Sugiyono, 2017). Berikut dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan maksud tujuan tertentu agar mendapatkan informasi lebih logis yakni pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara adalah orang yang akan menjawab pertanyaan oleh pewawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden. Teknis wawancara dilakukan langsung pada pimpinan organisasi atau pegawai lainnya mengenai Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata pantai labuhan jukung agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Tabel 3 Daftar Informan yang terkait dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanggal	
1.	Mardiansyah, S.KM	Sekretaris Pariwisata	Dinas Dinas Pariwisata	23 Juli 2024	
2.	Eko Nainggolan, S.S	JFT. Kepariwisataan Ekonomi Kreatif	Adyatama dan Pariwisata	Dinas Pariwisata	23 Juli 2024
3.	Erido Riska, S.Kep., M.M	Kepala Pengelolaan Limbah Peningkatan Lingkungan Hidup	Bidang Sampah, dan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	23 Juli 2024
4.	Maulana	Pedagang di Pantai Labuhan Jukung		24 Juli 2024	
5	Nurhayati	Petugas Kebersihan pantai Labuhan Jukung		24 Juli 2024	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2017) observasi merupakan dasar bagi semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Tabel 4 Daftar Observasi

No	Penemuan	Observasi
1.	Penumpukan sampah di pantai labuhan jukung	
2.	Kurangnya fasilitas kotak sampah dikawasan pantai labuhan jukung	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Data-data tersebut dapat berupa tulisan, buku-buku, arsip, dokumen, angka, gambar dan dokumen lain yang dapat mendukung proses penelitian penulis.

Tabel 5 Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian

No	Dokumen	Keterangan
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021	Tentang Pengelolaan Sampah
2.	Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021	Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat

3.	Nota Dinas 500.13/567/IV.18/2023	Nomor:	Permohonan Panganggaran Kebersihan	Pengalihan Petugas
4.	Peraturan Daerah 2018	Nomor 07 Tahun	Ketertiban Wisata	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dalam menggambarkan secara deskriptif, naratif terhadap suatu data yang telah diperoleh. Teknik analisis data bertujuan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang akurat sehingga data bisa dipahami pada saat disajikan ke khalayak umum dimana nantinya dapat dimanfaatkan sebagai solusi dari permasalahan. Menurut (Sugiyono, 2017) analisis data adalah mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menorganisasikan data dalam ke dalam satu kategori serta memilih mana data yang terpenting dan dipelajari juga membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut (Miles & Huberman, 1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data merupakan proses analisis data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, dikaji tema dan polanya, serta dibuat gambaran yang lebih jelas dengan tujuan agar mudah untuk melakukan pengumpulan data. Sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas, penyajian data dapat mudah dipahami dengan baik dan simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses reduksi data diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat. Transkrip wawancara tersebut kemudian dipilah sehingga mendapatkan fokus

penelitian terkait dengan Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan pada Pantai Labuhan Jukung.

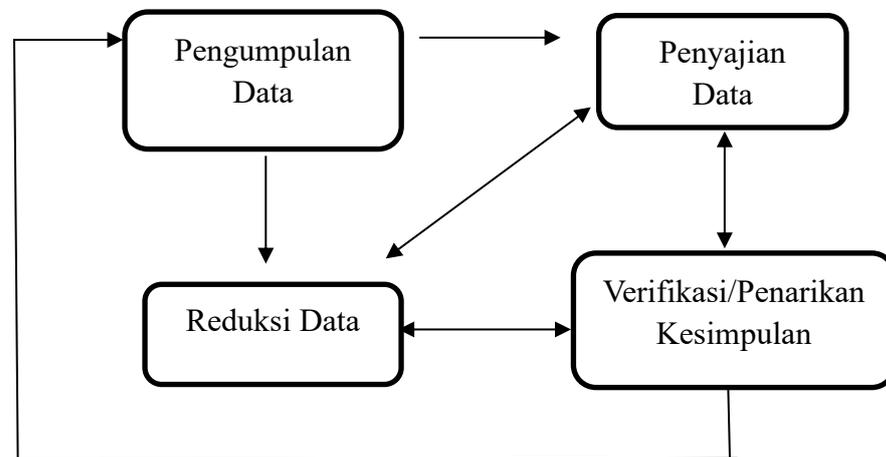
2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dimaksud ialah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian terdahulu penyajian data kualitatif yang paling sering digunakan adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, peneliti dapat lebih mudah memahami peristiwa yang terjadi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dengan demikian pada penelitian ini disajikan data dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan tentang Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam Menanggulangi sampah pada Pantai Labuhan Jukung.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data penelitian kualitatif adalah dengan cara penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat mengalami perkembangan apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini kesimpulan diambil dari inti pokok hasil dari penelitian. Dalam hal ini, diharapkan kesimpulan akhir dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal yaitu berkaitan dengan Bagaimana Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan

wisata Pantai Labuhan Jukung. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 3 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman
 Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2024

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh. Menurut (Moeloeng, 2017) untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. *Credibility*

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan menghasilkan penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria ini menggunakan teknik pemeriksaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan dengan pihak-pihak terlibat, memperbanyak referensi dan juga menganalisis kasus *negated* sebagai pembanding. Kegiatan yang dilakukan agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya antara lain:

1) Triangulasi

Denzim dalam (Moeloeng, 2017) mengatakan triangulasi data berarti menggunakan data dari sumber, metode penyidik dan teori. Triangulasi digunakan, karena merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan-kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan wawancara lebih dari satu pihak informan yang berasal dari unsur-unsur yang berbeda agar memperoleh informasi yang lebih lengkap dan jelas.

(Sugiyono, 2017) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorikan menjadi sebuah pandangan yang sama dan mana yang berbeda dan mana yang spesifik.

2) Perpanjangan Waktu Pengamatan

Perpanjangan waktu pengamatan dilakukan agar meningkatkan kepercayaan. Dengan perpanjangan pengamatan seperti ini peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lain dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan

perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber diharapkan bisa semakin dekat (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) sehingga tidak ada hal yang disembunyikan lagi.

2. *Transferability*

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian setelah dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

3. *Dependability*

Menurut (Sugiyono, 2017) pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak *reliabel* atau *dependable*. Penelitian seperti ini perlu diuji *dependability* nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. *Confirmability*

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal usul data, logika penarikan kesimpulan dari

data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. Dalam hal ini yang melakukan pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dibahas maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai Koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Wisata Pantai Labuhan Jukung yang dilihat dengan indikator Koordinasi menurut Handayani (Andini, 2022) dan Hasibuan dalam (Sugihartatmo, 2015).

1. Koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kebersihan lingkungan wisata Pantai Labuhan Jukung berjalan kurang baik. Akibat dari itu dapat dilihat masih adanya tumpukan sampah yang ada dikawasan pantai labuhan jukung yang didukung dengan kurangnya fasilitas pengelolaan kebersihan sampah yang tersedia di pantai labuhan jukung yaitu berupa kotak sampah dan mobil pengangkut sampah, dan juga tidak adanya evaluasi yang dilakukan kedua instansi yang berkoordinasi untuk membahas dan mencari solusi terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan agar permasalahan kebersihan lingkungan di pantai labuhan jukung dapat diselesaikan.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan koordinasi pada pengelolaan kebersihan lingkungan di pantai labuhan jukung yaitu kurangnya fasilitas kotak sampah dan mobil pengangkut sampah, kemudian tidak adanya evaluasi terkait pelaksanaan koordinasi dan juga kelemahan yang terdapat pada koordinasi horizontal *interrelated*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka peneliti bermaksud memberikan saran pada koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam penanggulangan sampah

di Pantai Labuhan Jukung yang semoga dapat memiliki manfaat bagi pihak yang berkoordinasi sebagai berikut:

1. Saran kepada Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat
 - a) Kegiatan rapat evaluasi diharapkan dapat diadakan dan dilaksanakan terjadwal. Agar kegiatan yang sudah dilakukan dapat di tinjau ulang dan dilakukan perbaikan dari kondisi sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan berjalan sesuai dengan kesepakatan dan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 - b) Adanya penganggaran dana dan juga koordinasi dengan para pedagang di kawasan Pantai Labuhan Jukung yang diharapkan mampu untuk meningkatkan fasilitas penunjang dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di pantai labuhan jukung. Hal tersebut diperlukan agar kegiatan pengelolaan kebersihan dapat berjalan lancar, efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan fasilitas dapat berupa menambah jumlah mobil pengangkut sampah dan kotak sampah.
 - c) Rekomendasi pembuatan *Center Point* khusus untuk pengelola kebersihan di Pantai Labuhan Jukung.
 - d) Diharapkan dapat dilakukannya pemantauan wisatawan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap sampah di kawasan Pantai Labuhan Jukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. . (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Aswaja Pressindo.
- Alex. (2011). *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Pustaka Baru Press.
- Amaruli, S. S. & R. J. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(7), 45.
- Andika F. (2017). *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kesempatan Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pantai Labuhan Jukung, Kab. Pesisir Barat)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Andini, I. (2022). Koordinasi Perencanaan Sektoral Dan Regional Dalam Perencanaan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara. *Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(02), 345–354.
- Andry, H. (2023). Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(1). <http://www.publikasi.unitri.ac.id/>
- Asri. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*, 1(1), 61–78. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v1i1.835>
- Azmi, A. (2022). Koordinasi Dinas Pariwisata Dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Dalam Pengembangan Kepariwisata Di Kabupaten Ciamis. *Universitas Galuh*, 2(1). <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1134>
- Bakar, N. (2014). *Analisis Timbulan dan Komposisi Sampah Rumah Tipe Sedang contoh Kasus Perumahan Taman Losari 2000 Makassar*. Jurusan Sipil Universitas Hasanuddin.
- Darmawan, D. dan F. S. (2016). Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Pelestarian Lingkungan Dengan Perilaku Wisatawan Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan. *Jurnal Geografi*, 04(1).
- Dedi, R. (2019). Konsep Wisata Industri di Kawasan Industri Jababeka Cikarang. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 1(1).

- Efendi, R. (2019). Analisis Koordinasi Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 4(2).
- Febby, F. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 3(1).
- Handyaningrat, S. (2002). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasiona*. Gunung Agung.
- Handoko. (2003). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*.
- Hani, H. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan IX). BPFE UGM. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=e2ppEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=manajemen+pengetahuan&ots=gV368HYIR3&sig=ugm1Twmq-r6Ya9ITLRHYA6ieJi0>
- Harahap, T. (2017). Manajemen Pengolahan Sampah Terpadu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2).
- Hasibuan, M. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Iskandar, A. A. (2018). Pentingnya Memelihara Kebersihan Dan Keamanan Lingkungan Secara partisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong Dan Kualitas Hidup Warga. *Jurnal Ilmiah Pena*, 1(1).
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Grasindo.
- Kobi, G. (2021). *Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Pusaka Almada.
- Kotler, P. (2010). *Manajemen Pemasaran*. Erlangga.
- Limanik, N. (2021). Koordinasi Stakeholder Dalam Pengawasan Kapal Wisata Di Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(5), 885–892.
- Makalew, M. (2021). Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/34304/32267>
- Manullang. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia.

- Meyers, K. (2009). *Panduan Dasar pelaksanaan Ekowisata*. Unesco Office.
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Moeloeng, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nafia, M. (2021). *Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak*. Universitas Islam Riau.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Nomaini, F. (2020). Analisis Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1).
- Priyono, M. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zifatama.
- Ramdani, M. (2015). Koordinasi Oleh BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(3).
- Register, S. S. & K. (2007). Marine debris & plastics: environmental concerns, sources, impacts and solutions. *Journal of Polymers and the Environment*, 4(15), 301–305.
- Rijal. (2019). Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Kota Makassar. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(3), 47–56. 10.21787/mp.3.1.2019.47-56
- Robbins, C. M. (2005). *Manajemen* (7th ed.). PT Indeks.
- Sealey, kathleen sullivan dan J. S. (2014). Recycling for Small Island Tourism Developments: Food Waste Composting at Sandals Emerald Bay, Exuma, Bahamas. *Resources Conservation and Recycling*, 25–37.
- Sinaga, O. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Layanan Tunggu (Lagu) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 9(3). <https://governance.lkispol.or.id>
- Sugihartatmo, R. S. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Kementrian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suzanna, N. (2013). *Bahan Ajar Gastroenterohepatologi*. Biro Publikasi Fakultas Kedokteran UKRIDA.

- Swarbrooke. (1996). *Pengembangan Pariwisata*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tololiu, W. (2022). Koordinasi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(122), 48–55.
- UNWTO. (2007). *A Practical Guide to Tourism Destination Management*.
- Waluyudin, M. (2022). Koordinasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1).
- Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi Pariwisata: Introduksi Informasi dan Aplikasi*. Penerbit Buku Kompas.
- Yoeti, O. A. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan pariwisata*. PT Balai Pustaka.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat no 11 Tahun 2021
- Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Undang- Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah